

SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI PADA KECAMATAN GERUNG LOMBOK BARAT

Ni Ketut Sriwinarti¹, Andres Faesal²

^{1,2}Dosen STMIK Bumigora Mataram

¹sriwinarti@stmikbumigora.ac.id, ²andris.faesal@stmikbumigora.ac.id

Abstract

The accuracy of type, number, price, place, time and quality are the expectations that every farmer expects in the process of distributing and procurement subsidized fertilizer. But the various alternatives which have already given or designed were not be able to solve the scarcity of fertilizer and it was happening very frequent in our environment. The usage of control card (farmer card) has been designed by government in 2007-2008 but it was not well distributed to all regions in East Nusa Tenggara. Whereas the usage of this card can be a good solution that can help in controlling (managing) the fertilizer distribution so the fertilizer can be given to the appropriate farmers. The implementing of farmer card along with the making of information system of fertilizer distribution in Gerung is designed to solve the inaccuracies of subsidized fertilizer distribution. Every farmer registered in farmer groups and RDKK (which is used by retailers to get the fertilizer) will get the identity card. By using the identity card farmers can come and show the identity card to retailers and then the retailers will see the identity and check the amount of fertilizer that each farmer has. By this system retailers can distribute the fertilizer accurately in the term of target, quantity and price. Besides, this system also can help in observing the redeem that retailer did and the numbers of fertilizer sold.

Keywords : Farmer Card, Gerung Districts, Subsidized Fertilizer, Distribution System

1. PENDAHULUAN

Penyaluran pupuk bersubsidi pada dasarnya telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR. 130/11/2014 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015. Selain itu, kios binaan atau pengecer resmi juga mendapatkan surat dari Produsen berkaitan masalah proses penyaluran pupuk yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dokumen yang harus disiapkan untuk memperlancar alur distribusi pupuk dari produsen adalah RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), dimana RDKK yang diminta harus sudah divalidasi oleh departemen pertanian setempat. Setelah prasyarat tersebut dipenuhi barulah kios yang ditunjuk dapat menebus pupuk yang telah di tetapkan berkaitan syarat minimal jumlah penebusan [1].

RDKK merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian [2]. Dalam proses penyaluran pupuk, RDKK merupakan kartu kendali utama dan masih satu-satunya yang digunakan oleh pemerintah untuk menghitung maupun menyalurkan kebutuhan pupuk di satu wilayah. Dimana untuk satu musim kedepan, pengecer sudah mendapatkan data men-

genai berapa kebutuhan petani, dan siapa saja pemiliknya, terdapat kendala yang terjadi dilapangan yaitu pada saat pengecer mengimplementasikan pupuk tersebut. Sebagai penyalur yang berhubungan langsung dengan petani, terkadang pengecer atau kios tidak bisa secara pasti membuktikan bahwasanya memang benar bahwa petani tersebut berada dikelompok yang terdaftar dan berapa hak yang seharusnya diberikan ke masing-masing petani sesuai dengan luas lahan yang dikelola. Karena data yang diperoleh oleh pengecer adalah hanya nama.

Permasalahan yang sering terjadi dilapangan disebabkan karena kurangnya koordinasi antara ketua kelompok tani dengan petani yang terdaftar dalam RDKK, sehingga masih banyak diketemukan petani yang tidak mengetahui apakah dirinya terdaftar atau tidak, Mayoritas (65%) Petani terdaftar di RDKK mengerjakan tanah yang bukan miliknya (kontrak) sehingga apabila masa kontrak berakhir dan terjadi pergantian pengerja tanah maka data nya tidak langsung terupdate dalam RDKK, Di dalam beberapa kasus ditemukan kios-kios binaan yang tidak langsung (tepat waktu) dalam menebus pupuk pada PT. Petrosida sehingga petani tidak bisa membeli pupuk yang merupakan haknya [3].

Sistem informasi pendistribusian pupuk di Kecamatan Gerung, dirancang dengan harapan agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi khususnya pada lini akhir yaitu ketidaktepatan dalam hal penyaluran pupuk

bersubsidi. Setiap petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK yang kemudian digunakan oleh pengecer untuk melakukan penebusan pupuk akan mendapatkan kartu identitas. Dengan adanya kartu identitas tersebut para petani yang sudah memiliki identitas dapat langsung datang ke pengecer kemudian pengecer bisa melihat biodata dan jatah pupuk yang dimiliki oleh masing-masing petani.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Lokasi Penelitian

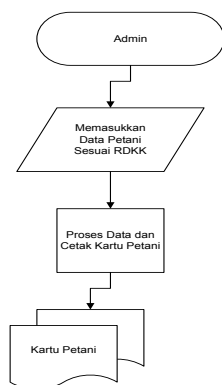
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purpose) di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut selain merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kebutuhan pupuk yang cukup besar, para petani yang berada di daerah tersebut sangat terbuka akan informasi yang dibutuhkan.

2.2. Alur Sistem

Sistem yang dibangun memiliki maksud utama untuk membantu dalam memberikan identitas pemilik pupuk (petani) dan berapa jatah pupuk yang dimiliki oleh petani, sehingga pada prinsipnya alur kerjanya dapat terbagi menjadi 2 bagian yaitu pemrosesan pencetakan kartu petani dan transaksi penebusan pupuk

2.2.1 Kartu Petani

Sesuai dengan peraturan menteri Nomor 130 tahun 2014, yang mengatur mengenai jalur distribusi pupuk bersubsidi oleh sebab itu di dalam sistem ini tetap digunakan RDKK sebagai pedoman dalam penginputan data, dimana secara sederhana digambarkan pada bagan dibawah ini:



Gambar 1. Alur Proses Kartu Petani

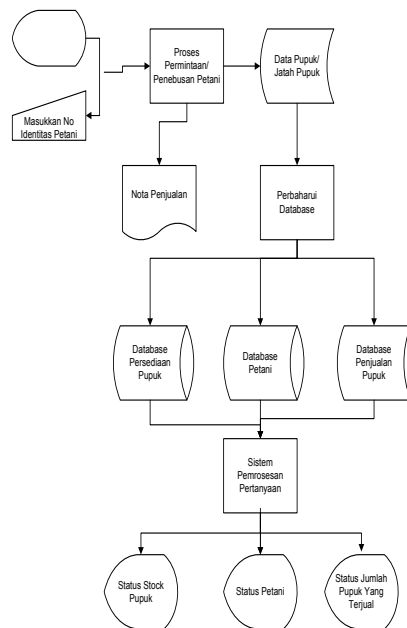
Kartu petani akan dibagikan ke masing-masing petani, dimana kartu tersebut akan dibawa oleh petani pada saat proses penebusan pupuk. Di mana desain kartu yang akan diberikan untuk masing-masing petani yaitu seperti dibawah ini:



Gambar 2. Desain kartu pupuk

2.2.2 Penebusan Pupuk

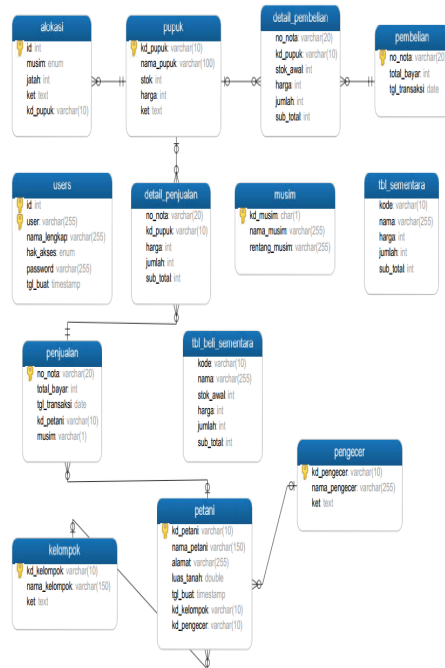
Pada saat penebusan pupuk para petani membawa kartu identitas yang telah diberikan sehingga pihak pengecer dapat melihat apakah petani tersebut memiliki jatah pupuk atau tidak. Apabila petani tersebut terdaftar dan memiliki jatah pupuk, maka proses penebusan akan dilakukan.



Gambar 3. Alur Proses Penebusan Pupuk

2.3 Desain Database

Di dalam desain database, dapat dilihat file-file apa saja yang terintegrasi, spesifikasi, struktur dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan.



Gambar 4. Desain Database

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketepatan Jumlah dan Jenis

Kelangkaan pupuk merupakan permasalahan yang sering muncul khususnya di desa Gerung. Para petani sering mengeluhkan berkaitan ketiadaan pupuk yang ada di pasaran, sedangkan dari pihak produsen mengungkapkan bahwasanya mereka telah memproduksi sesuai dengan anggaran yang diberikan (disusun) oleh masing-masing daerah. Apabila ditelusuri langsung ke petani di ketahui bahwasanya para petani tidak mengetahui kemana seharusnya dia membeli pupuk yang merupakan bagianya, selain itu terdapat ketidakjelasan di lini pengecer mengenai berapa seharusnya hak pupuk yang seharusnya diberikan untuk masing-masing petani.

Apabila merujuk dari peraturan Menteri no 122/Permentan/SR.130/11/2013 yang mengungkapkan bahwasanya kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifikasi lokasi dengan pertimbangan usulan yang diajukan oleh dinas Provinsi kepada direktur jenderal. Berdasarkan peraturan tersebut maka dalam system ini dirancang pembagian (penjatahan) pupuk ke masing-masing petani adalah sesuai dengan kepemilikan tanah yang dimiliki yaitu misalkan luas tanah yang dimiliki adalah 10 are, maka sesuai dengan ketetapan dari dinas pertanian bahwasanya setiap 10 are tanah yang dimiliki akan menerima 20 kg urea, 10 kg NPK, 5 kg Za, 10kg SP-36 dan 50 kg Organik. Sehingga secara otomatis apabila semakin luas tanah yang dimiliki maka semakin banyak hak pupuk yang diberikan.

No	Kode Pupuk	Nama Pupuk	Musim Tanam	Jumlah 0,1 Ha	Keterangan	Aksi
1	P001	UREA	1	20 Kg		
2	P001	UREA	2	20 Kg		
3	P001	UREA	3	30 Kg		
4	P002	ZA	1	5 Kg		
5	P002	ZA	2	5 Kg		
6	P002	ZA	3	5 Kg		
7	P003	NPK - Ponsika	1	10 Kg		
8	P003	NPK - Ponsika	2	10 Kg		
9	P003	NPK - Ponsika	3	20 Kg		

Gambar 5. Layout Alokasi pupuk

1.2 Ketepatan Harga

Produk yang disubsidi oleh pemerintah, jumlah maupun harganya sudah ditetapkan oleh peraturan menteri atau badan pemerintah. Pupuk subsidi seperti Urea, ZA, NPK dan SP-36 memiliki harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan Menteri yang diterbitkan setiap satu tahun sekali. Namun praktek dilapangan menunjukkan seringnya terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan [2]. Dengan adanya sistem ini, harga eceran pupuk sudah ditetapkan sehingga pengecer akan mengikuti asas dan tidak ada perbedaan antara petani satu dengan yang lainnya.

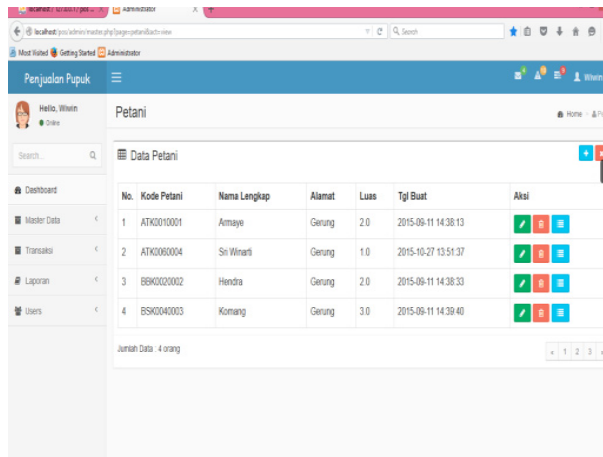
No	Kode Pupuk	Nama Pupuk	Harga	Stok	Keterangan	Aksi
1	P001	UREA	1800	957 Kg		
2	P002	ZA	1400	775 Kg		
3	P003	NPK - Ponsika	2300	888 Kg		
4	P004	SP-36	200	859 Kg		
5	P005	Organik	500	994 Kg		
6	P006	Apa-Apa	3000	200 Kg		

Gambar 6. Layout Persediaan Pupuk

1.3 Ketepatan Sasaran

Salah satu tujuan yang diharapkan pada saat penyaluran pupuk adalah adanya mata rantai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga pupuk yang dibutuhkan oleh petani mudah dijangkau dan efisien [4]. Namun permasalahan yang sering muncul pada saat pendistribusian pupuk adalah siapa yang memiliki hak akan pupuk tersebut. Di dalam RDKK yang diterima oleh pengecer, hanya terdapat nama petani dan jumlah pupuk yang akan diterima. Para pengecer sering mengalami kebingungan apakah benar orang yang datang saat melaku-penebusan pupuk adalah orang yang benar. Besar kemungkinan terjadi kesalahan dalam pemberian pupuk ataupun satu orang bisa mendapatkan lebih dari satu kali atau tidak sama sekali. Dengan adanya system ini, admin

akan menginputkan data petani sesuai dengan informasi yang diberikan, kemudian para petani akan dibagikan kartu petani yang menunjukkan identitas para petani, dimana pada saat akan melakukan penebusan (pembelian) pupuk, petani menunjukkan kartunya ke pengecer.

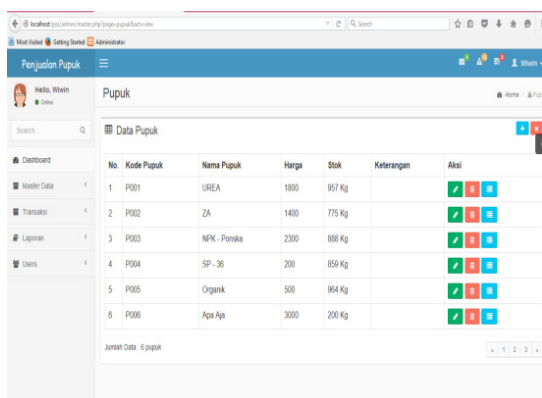


No.	Kode Petani	Nama Lengkap	Alamat	Lusa	Tgl Buat	Aksi
1	ATK0010001	Amayye	Gerung	2.0	2015-09-11 14:38:13	[Edit] [Hapus]
2	ATK0000004	Si Winarti	Gerung	1.0	2015-10-27 13:51:37	[Edit] [Hapus]
3	BEK0020002	Hendra	Gerung	2.0	2015-09-11 14:38:33	[Edit] [Hapus]
4	BSK0040003	Komang	Gerung	3.0	2015-09-11 14:39:40	[Edit] [Hapus]

Gambar 7. Data Petani

1.4 Ketepatan Informasi Persediaan

Selain ketepatan-ketepatan yang dijabarkan pada point-point sebelumnya, sistem ini juga dapat membantu melihat secara cepat mengenai jumlah pupuk yang tersedia di gudang.

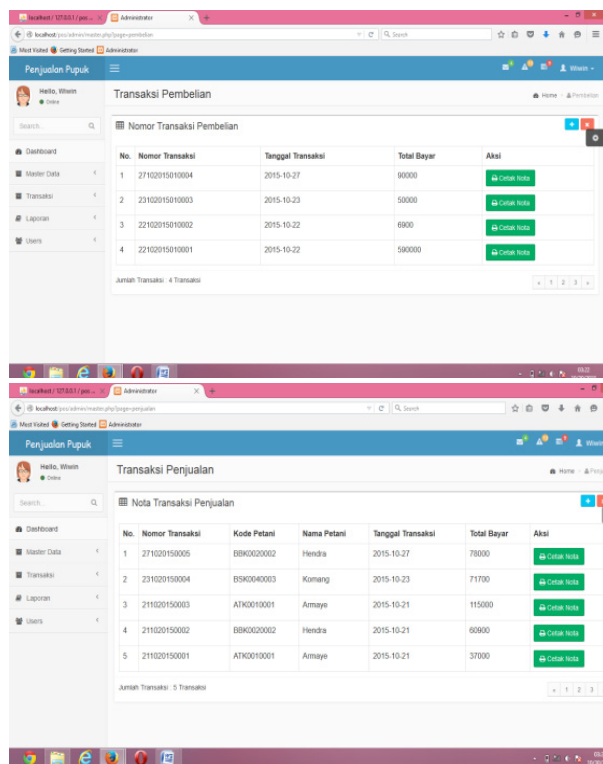


No.	Kode Pupuk	Nama Pupuk	Harga	Stok	Keterangan	Aksi
1	P001	UREA	1800	957 Kg		[Edit] [Hapus]
2	P002	ZA	1400	775 Kg		[Edit] [Hapus]
3	P003	NPK - Ponska	2300	888 Kg		[Edit] [Hapus]
4	P004	SP - 36	200	859 Kg		[Edit] [Hapus]
5	P005	Organik	500	964 Kg		[Edit] [Hapus]
6	P006	Apa Aja	3000	200 Kg		[Edit] [Hapus]

Gambar 8. Data Pupuk yang Tersedia

1.5 Ketepatan Nilai Penebusan

Menu penjualan dan pembelian yang dirancang dapat membantu pengecer dalam memproses transaksi pembelian pupuk dan transaksi penjualan pupuk sehingga dapat dihasilkan laporan yang menunjukkan berapa jumlah pupuk yang dibeli (ditebus) oleh pengecer dan berapa jumlah pupuk yang terjual oleh pengecer. Di laporan penjualan ditunjukkan siapa saja petani yang melakukan pembelian pupuk dan berapa jumlahnya.



Transaksi Pembelian

No.	Nomor Transaksi	Tanggal Transaksi	Total Bayar	Aksi
1	27102015010004	2015-10-27	90000	[Edit] [Hapus]
2	23102015010003	2015-10-23	50000	[Edit] [Hapus]
3	22102015010002	2015-10-22	6000	[Edit] [Hapus]
4	22102015010001	2015-10-22	50000	[Edit] [Hapus]

Jumlah Transaksi: 4 Transaksi

Transaksi Penjualan

No.	Nomor Transaksi	Kode Petani	Nama Petani	Tanggal Transaksi	Total Bayar	Aksi
1	271020150005	BEK0020002	Hendra	2015-10-27	78000	[Edit] [Hapus]
2	231020150004	BSK0040003	Komang	2015-10-23	71700	[Edit] [Hapus]
3	211020150003	ATK0010001	Amayye	2015-10-21	115000	[Edit] [Hapus]
4	211020150002	BEK0020002	Hendra	2015-10-21	60900	[Edit] [Hapus]
5	211020150001	ATK0010001	Amayye	2015-10-21	37000	[Edit] [Hapus]

Jumlah Transaksi: 5 Transaksi

Gambar 9. Menu Pembelian dan Penjualan

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwasanya RDKK yang selama ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengendalian distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal, mulai dari terkendala masalah data dalam RDKK maupun pada saat implementasinya. Sedangkan pada saat penyaluran masih ditemukan adanya perbedaan harga dari yang ditetapkan. System pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan alternative system yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat khususnya diwilayah kecamatan Gerung. System ini memberikan ketepatan pada saat proses penyaluran pupuk yaitu ketepatan jumlah pupuk yang terbagi, ketepatan jenis pupuk yang diberikan, ketepatan harga pupuk sesuai dengan peraturan Menteri dan ketepatan sasaran atau tepat ke konsumen pupuk. Petani juga diberikan identitas (kartu petani) yang dapat digunakan sebagai tanda pengenal pada saat proses pembelian pupuk ataupun bantuan-bantuan yang akan diberikan nantinya.

Selain membantu dari pihak petani, system ini juga dirancang untuk membantu pengecer, dimana melalui system ini dapat di informasikan secara cepat dan tepat berkaitan jumlah persediaan pupuk, jumlah pembelian pupuk yang telah dilakukan dan nilai penjualan pupuk perperiode.

Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya menggunakan satu pengecer saja, sehingga pengendalian distribusi pupuknya tidak bisa dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu dibutuhkan lebih dari satu pengecer. Selain itu penelitian ini juga bisa dikembangkan dengan membangun aplikasi berbasis android, dimana informasi ketersediaan pupuk setiap pengecer dapat terlihat bukan hanya oleh pemilik kios tetapi juga oleh petani.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 122/Permentan/SR.122/11/2013 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2014
- [2] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 130/Permentan/SR.130/11/2014 kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2015
- [3] Sriwinarti, Ni Ketut dan Andres Faesal, 2015, Analisa Awal Pengendalian Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Gerung Lombok Barat, *Prosiding Seminar Nasioanl Teknologi Informasi dan Aplikasinya*, Vol 7: H-7-11, Politeknik Negeri Malang.
- [4] Hollensen, S. 2010, Marketing Management: A Relationship Approach. 2nd ad., Harlow, Essex: Person.
- [5] Sudjono, Spudnik, 2011, Sistem Distribusi Relationship: Kajian Penyempurnaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani. *Analisa Kebijakan Pertanian*. Volume 9, No 4 Des 2011: 313 - 330